

Menyikapi Gertakan PNG

O l e h

BAIQ WARDHANI*

KETEGANGAN diplomatik antara RI dan PNG memuncak dengan adanya protes dan gertakan yang ditujukan ke Indonesia oleh Wakil PM PNG Belden Namah terkait patroli udara TNI-AU terhadap pesawat-pesawat PNG. PM PNG John O'Neill mengancam akan memersonanongratakan Dubes RI dari Port Moresby, ibu kota PNG, dan membekukan semua hubungan diplomatik dua negara (*Jawa Pos* 7/1/2012).

Seperti diketahui, sikap keras PNG itu muncul ketika PM PNG menyatakan tersinggung oleh sikap TNI-AU yang mengirinkan pesawat tempurnya untuk membayangi-bayangi pesawat yang membawa wakil PM PNG di wilayah perbatasan dua negara pada November 2011 lalu. Ancaman pemutusan hubungan diplomatik itu dinilai berlebihan. Pada saat itu diberitakan bahwa dua pesawat militer Indonesia hampir bertabrakan dengan pesawat jet yang ditumpangi Wakil PM PNG Belden Namah dan para pejabat senior PNG yang baru pulang tugas dari Malaysia. Dalam tatakrama diplomatik, pemutusan hubungan diplomatik hanya dapat dilakukan bila terjadi gangguan sangat serius dalam hubungan dua negara.

Perlu diamati apakah terkait tuduhan tersebut RI telah melakukan gangguan serius terhadap kelangsungan hubungan dengan negara tetangga di timur kita tersebut. Mengamati perilaku PNG yang berlebihan itu, *scapegoat politics* setidaknya dapat menjelaskannya.

Scapegoat Politics

"Politik kambing hitam" biasa dilakukan untuk menimpakan kesalahan kepada pihak lain atas sebuah masalah. Hal itu juga umum terjadi dalam hu-

ubungan antar-negara. *Scapegoat politics* yang dilakukan para elite PNG bersumber dari beberapa masalah dalam negeri PNG. *Pertama*, PNG kembali dilanda krisis akibat ketidakstabilan dalam negeri. Krisis politik bukan yang pertama terjadi di PNG, sebuah negara yang tergolong labil sistem politiknya setelah mendapat kemerdekaan dari Australia pada 1975. Krisis yang terjadi pada akhir 2011 yang disebut *double trouble* itu memuncak dengan perebutan kekuasaan yang terjadi antara PM PNG saat ini, John O'Neill, dan PM Michael Somare (PM sebelumnya).

Krisis kepemimpinan tersebut terjadi karena dalam beberapa bulan PNG memiliki dua perdana menteri, dua kabinet, dua gubernur jenderal, dua kepala kepolisian, dan dua menteri keuangan. Perlu diketahui bahwa Somare dan O'Neill adalah dua *big man* yang memiliki pengikut dan pengaruh kuat di perpolitikan PNG. *Big man* adalah sebutan bagi pemimpin tradisional/adat di masyarakat Melanesia (PNG adalah salah satu di antaranya). Pemimpin tradisional *big man* memiliki posisi penting dalam menentukan kebijakan anggota sukunya karena mereka merupakan simbol kehadiran nenek moyang. Sekalipun mereka telah mengadopsi nilai-nilai demokrasi Barat, corak perpolitikan di kawasan tersebut masih diwarnai tradisi dan budaya lokal, yang secara bersamaan dipahami sebagai sebuah "ideologi" khas mereka.

Kedua, terjadi kegelisahan di Bougainville. Bougainville adalah salah satu provinsi PNG yang menuntut kemerdekaan karena persoalan primordial (perbedaan warna kulit dengan warga PNG umumnya), ekonomi (pembagian tidak adil atas tambang tembaga di Paguna yang digali oleh perusahaan Bougainville Copper Limited-BCL, usaha tambang di bawah kepemilikan saham terbesar Rio Tinto), dan sekaligus menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sekalipun telah berstatus daerah otonomi dan pernah berada di bawah pengawasan Australia, Provinsi Bougainville sejatinya masih bergolak karena pemberontakan yang dilakukan Bougainville Revolutionary Army—tentara pemberontak Bougainville—belum usai. Tahun 1989 tambang berhenti beroperasi karena pemberontakan yang sulit dipadamkan.

Penambangan di wilayah Paguna tersebut dibuka kembali karena masih memiliki deposit 3,5 juta ton tembaga yang setara dengan USD 32,4 miliar dan 12,7 juta ons emas senilai USD 17,8 miliar. Tambang tersebut masih mampu menghasilkan sekitar 170.000 ton tembaga dan 500.000 ons emas setiap tahun. Tidak dapat disangkal, pertarungan O'Neill-Somare tidak terlepas dari unsur "uang" dari pertambangan di Bougainville.

Ketiga, beberapa pihak menyuarakan adanya faktor OPM (Organisasi Papua Merdeka) di balik ketegangan hubungan RI-PNG. Benar bahwa beberapa pendukung OPM menggunakan wilayah perbatasan RI-PNG untuk keperluan politiknya, yaitu melepaskan diri (separatis) dari Indonesia. Banyak pula pihak yang berspekulasi adanya konspirasi internasional untuk mengganggu hu-

ubungan RI dengan PNG yang selalu menjadikan OPM sebagai *scapegoat*.

Hendaknya RI bersikap lebih bijaksana menghadapi spekulasi itu. PNG adalah negara yang secara resmi tidak mendukung keinginan Papua melepaskan diri dari Indonesia sekalipun ada beberapa kelompok di PNG yang bersimpati kepada OPM karena mereka adalah *blood brothers* sehingga dukungan yang didasari *clan* tersebut dapat dipahami. Namun, sikap resmi pemerintah PNG sangat tegas mendukung kedaulatan NKRI. Jika PNG mendukung OPM, itu sama saja dengan sikap "bunuh diri" karena PNG juga menghadapi gerakan separatis di Bougainville dan beberapa wilayah lain. PNG tidak menginginkan perpecahan di negara sendiri dengan cara mendukung OPM. Itu berarti dukungan kepada OPM merupakan justifikasi kuat bagi separatis Bougainville dan kelompok-kelompok separatis lain untuk berpisah dari PNG.

Menyikapi ancaman PNG yang akan memutuskan hubungan diplomatik, RI tidak perlu mengambil sikap reaksioner yang dapat meningkatkan ketegangan RI-PNG dan merugikan kepentingan Indonesia. Sebab, pada dasarnya, *move* PNG tersebut tidak terlepas dari krisis domestik PNG. Ancaman persona nongrata terhadap Dubes RI dari Port Moresby hanya perlu penyelesaian diplomatik damai. RI sudah sangat berpengalaman dalam persengketaan dengan PNG. Jika dibandingkan dengan beberapa insiden pada 1980-an, apa yang terjadi dalam beberapa hari ini bukanlah insiden berskala tinggi.

*) Pengajar Masyarakat, Budaya, Politik Pasifik Selatan, HI FISIP Unair